

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
TAHUN BUKU 2023
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“**Perseroan**”) berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (“**Rapat**”) dengan perincian informasi sebagai berikut:

A. Hari/Tanggal, Waktu, dan Tempat Pelaksanaan Rapat

Hari / Tanggal : Rabu / 06 Maret 2024
Waktu : Pukul 14.31 WIB s.d. 17.13 WIB
Tempat : Menara Bank BTN Jalan Gajah Mada No.1, Jakarta Pusat – 10130

B. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit Perseroan yang hadir dalam Rapat

Rapat dipimpin oleh Sdr. Chandra M. Hamzah, selaku Komisaris Utama/Independen, sesuai keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 21 Februari 2024 yang disampaikan melalui Surat Dewan Komisaris Perseroan Nomor 27/KOM/BTN/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 perihal Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Independen	:	Sdr. Chandra M. Hamzah
Wakil Komisaris Utama/Independen	:	Sdr. Iqbal Latanro
Komisaris Independen	:	Sdr. Armand B. Arief
Komisaris Independen	:	Sdr. Sentot A. Sentausa
Komisaris	:	Sdr. Andin Hadiyanto
Komisaris	:	Sdr. Herry Trisaputra Zuna
Komisaris	:	Sdr. Himawan Arief Sugoto

Direksi

Direktur Utama	:	Sdr. Nixon L.P. Napitupulu
Wakil Direktur Utama	:	Sdr. Oni Febriarto Rahardjo
Direktur IT and Digital	:	Sdr. Andi Nirwoto
Direktur Assets Management	:	Sdri. Elisabeth Novie Riswanti
Direktur Distribution and Funding	:	Sdr. Jasmin
Direktur Risk Management	:	Sdr. Setiyo Wibowo
Direktur Consumer	:	Sdr. Hirwandi Gafar
Direktur Finance	:	Sdr. Nofry Rony Poetra

Direktur Human Capital, Compliance, and Legal

: Sdr. Eko Waluyo

Direktur Institutional Banking

: Sdr. Hakim Putratama

Komite Audit

Ketua merangkap Anggota

: Sdr. Iqbal Latanro

Anggota

: Sdr. Sentot A. Sentausa

Anggota

: Sdr. Andin Hadiyanto

Anggota

: Sdr. Endang A. Suprijatna

Anggota

: Sdr. Peter Eko Budi Darwito

C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham termasuk di dalamnya saham Seri A Dwiwarna yang seluruhnya mewakili 11.192.526.051 (sebelas miliar seratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu lima puluh satu) saham atau sebesar 79,7504035% (tujuh puluh sembilan koma tujuh lima nol empat nol tiga lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 14.034.444.413 (empat belas miliar tiga puluh empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga belas) saham yang terdiri dari:

- 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna; dan
- 14.034.444.412 (empat belas miliar tiga puluh empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus dua belas) saham seri B;

dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat.

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan, Pendapat, dan/atau Usul.

Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, kecuali mata acara kelima karena bersifat laporan, telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, dan/atau usul.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil dengan perhitungan suara, yang disetujui oleh Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah dengan ketentuan:

- a. Mata acara Rapat pertama sampai dengan keempat, keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- b. Mata acara Rapat kelima, hanya bersifat laporan sehingga tidak terdapat keputusan.
- c. Mata acara Rapat keenam, keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham Yang Berhak lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- d. Untuk mata acara Rapat ketujuh, keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham Yang Berhak lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

F. Pihak Independen Penghitung Suara

Hasil pemungutan suara dihitung oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek (“**BAE**”) dan selanjutnya divalidasi dan diumumkan oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., yang keduanya merupakan pihak yang independen yang ditunjuk oleh Perseroan.

G. Keputusan Rapat

Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK TABUNGAN NEGARA Tbk atau disingkat PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk Nomor 06 tanggal 6 Maret 2024, yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., yang pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Mata Acara Pertama Rapat

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023 sekaligus Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2023.

Pertanyaan, Pendapat, dan /atau Usul

Terdapat 4 (empat) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, pendapat, dan/atau usul sehubungan dengan mata acara pertama Rapat. Rangkuman dan intisari proses tanya jawab untuk mata acara tersebut adalah sebagai berikut:

No	Tanggapan/Pertanyaan	Jawaban
1.	Dalam rangka pelaksanaan pembinaan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk/”BTN” untuk peningkatan kinerja Perseroan, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada segenap jajaran Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai BTN atas: a. Keberhasilan dalam meningkatkan kinerja Perseroan, yang tercermin pada: 1) Laba bersih meningkat 14,97% YoY menjadi Rp3,50 triliun. 2) Total Kredit meningkat 11,87% YoY menjadi Rp333,69 triliun. 3) Realisasi <i>Fee Based Income</i> meningkat 60,15% YoY menjadi 3,22 triliun. 4) Rasio CASA meningkat dari 48,52% menjadi 53,73%. 5) Rasio CIR turun dari 46,66% menjadi 45,26%.	Terima kasih Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atas tanggapannya. Perseroan akan mencatat dan menindaklanjuti catatan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

No	Tanggapan/Pertanyaan	Jawaban
	<p>6) Rasio NPL Gross menurun dari 3,38% menjadi 3,01% dan LAR menurun dari 23,24% menjadi 21,20%.</p> <p>b. Komitmen Perseroan dalam mendukung program pemerintah untuk memaksimalkan penyediaan pembiayaan rumah rakyat khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka mencapai <i>zero backlog</i> pada tahun 2045. Kami berharap capaian tersebut terus ditingkatkan pada masa mendatang sehingga Perseroan dapat berkontribusi lebih optimal bukan hanya terhadap <i>shareholder return</i> namun juga negara dan masyarakat.</p> <p>2. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris dan Direksi BTN untuk perbaikan kinerja di masa mendatang, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk mengantisipasi kondisi ekonomi global pada tahun 2024 yang berpotensi adanya tekanan inflasi dan pengetatan kebijakan moneter global dengan ruang fiskal yang semakin terbatas, Perseroan agar menetapkan strategi penyaluran kredit yang lebih selektif, menerapkan manajemen risiko kredit yang berkesinambungan, serta pengelolaan likuiditas yang optimal; b. Secara nasional, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 diprediksi akan tetap kuat dan tumbuh positif dalam kisaran 4,8% - 5,2%. Selain itu, sektor perumahan masih memiliki ruang tumbuh yang sangat besar mengingat masih tingginya angka <i>backlog</i> perumahan nasional, tingginya jumlah masyarakat yang belum memiliki rumah yang layak, dan perpanjangan stimulus yang diberikan Pemerintah pada sektor perumahan. Peluang ini agar dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Perseroan dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada sehingga dapat menjadi <i>The Best Mortgage Bank in Southeast Asia</i> sebagaimana yang diharapkan; c. Perseroan agar berfokus pada penguatan strategi, inovasi bisnis, serta ekspansi pasar untuk meningkatkan kapitalisasi pasar sehingga dapat memberikan nilai tambah kepada Pemegang Saham; d. Mengingat pada tahun 2023 terjadi penurunan <i>net interest income</i>, Perseroan diharapkan: <ul style="list-style-type: none"> 1) Melakukan upaya penurunan <i>cost of fund</i> melalui peningkatan dana murah (CASA), penguatan bisnis berbasis ekosistem, penetrasi <i>mobile banking</i> sebagai <i>digital financial solution</i>, serta mengoptimalkan penetrasi <i>cash management service</i> bagi nasabah, sehingga dapat unggul dalam persaingan <i>transaction banking service</i>. 2) Mendorong ekosistem perumahan rumah dengan KPR model baru, ekspansi bisnis 	

No	Tanggapan/Pertanyaan	Jawaban
	<p>lainnya yang berkualitas dan berkelanjutan, serta mengoptimalkan <i>yield</i> atas penyaluran kredit dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian sehingga terdapat peningkatan profitabilitas yang berkesinambungan.</p> <p>e. Terus mendorong peningkatan kontribusi pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Operasional Lainnya khususnya <i>Fee Based Income</i> (FBI) melalui akelerasi layanan keuangan <i>digital</i> dan <i>transactional banking</i> yang masif, terutama pada <i>user internet</i> dan <i>mobile banking</i>, serta pengembangan <i>fee based</i> dari sumber-sumber baru lainnya seperti layanan valas, <i>trading forex</i>, dan <i>structured products</i>;</p> <p>f. Memastikan pencapaian target KPI Penyertaan Modal Negara (PMN), terutama pada indikator-indikator yang tidak tercapai pada tahun 2023 yaitu BOPO, NPL Gross dan Realisasi KPR Subsidi;</p> <p>g. Sehubungan dengan semakin tingginya peran teknologi informasi dalam industri perbankan dan semakin masifnya upaya peretasan dan gangguan keamanan siber yang berdampak sangat masif baik secara operasi, keuangan, maupun reputasi, Perseroan diharapkan memperkuat keamanan sibernya (<i>cyber security</i>) baik dari aspek kebijakan, infrastruktur, sistem operasi, maupun mitigasi risiko;</p> <p>h. Dalam rangka mendorong prinsip keuangan berkelanjutan, Perseroan agar menjaga komitmen dalam mengembangkan inisiatif ESG antara lain melalui program kerja Perseroan, penyaluran kredit maupun penerbitan surat utang dengan berlandaskan pada prinsip <i>green financing</i>. Selain itu, implementasi inisiatif ESG agar diselaraskan dengan arah fokus program pemerintah dalam rangka pemulihan dan pengembangan ekonomi nasional;</p> <p>i. Perseroan agar terus berkomitmen melakukan perbaikan dalam implementasi Strategi Anti Fraud pada setiap pilarnya dan tidak memberikan toleransi (<i>zero tolerance</i>) pada setiap bentuk <i>fraud</i> baik internal maupun eksternal;</p> <p>j. Menindaklanjuti temuan audit/pemeriksa internal maupun eksternal, mengoptimalkan pengelolaan manajemen risiko dan implementasi <i>three line of defense</i>, serta senantiasa mengedepankan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dan memperhatikan ketentuan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM).</p>	
2.	<p>a. Dalam perhatian kami, terdapat peningkatan pencadangan rugi penurunan nilai aset keuangan. Apakah ini disebabkan oleh kenaikan NPL akibat ketidakmampuan BTN membayar hutang kredit</p>	<p>Di tahun 2023, Perseroan mengalami penurunan NPL gross yaitu dari 3,38% menjadi 3,01%. Terkait dengan adanya peningkatan pencadangan CKPN untuk NPL</p>

No	Tanggapan/Pertanyaan	Jawaban
	<p>rumah, kredit motor, kredit tanpa agunan atau kartu kredit?</p> <p>b. Baru-baru ini PT Akulaku Finance Indonesia berhasil mendapatkan pencabutan sanksi oleh OJK. Apakah hal tersebut memberikan dampak pada industri perbankan, terutama BTN mengingat Perusahaan <i>Buy Now Pay Later</i> (BNPL) memiliki CAGR >10% per tahun?</p>	<p>di tahun 2023 yaitu mencapai 155,16%, adalah bertujuan untuk meningkatkan kehati-hatian Perseroan terhadap risiko NPL dan meningkatkan coverage Perseroan.</p> <p>Perseroan memiliki konsentrasi bisnis yang berbeda dengan PT Akulaku Finance Indonesia. Sampai dengan saat ini, Perseroan belum memiliki irisan persaingan dengan PT Akulaku. Namun ke depannya, Perseroan merencanakan akan mengeluarkan produk BNPL yang diharapkan akan keluar izinnya dari OJK tahun ini.</p>
3.	<p>a. Divisi bisnis manakah yang menjadi gangguan dalam meningkatkan laba Perseroan dan solusi apa yang manajemen lakukan untuk memperbaikinya?</p> <p>b. Sebagai raja KPR rumah subsidi, adakah agenda Perseroan untuk menciptakan layanan KPR flat cicilan s.d. 30 tahun, dan apakah hal tersebut akan mengganggu NPL seandainya nasabah wanprestasi karena pensiun atau PHK?</p>	<p>Pada dasarnya, seluruh Divisi telah berkontribusi dengan baik, sehingga tidak ada Divisi bisnis yang menjadi gangguan dalam meningkatkan laba. Hal tersebut tercermin dari kinerja Perseroan di tahun 2023 yang secara umum mencatat hasil yang baik, antara lain aset meningkat, pertumbuhan kredit dan DPK meningkat, LAR dan rasio keuangan lainnya tercatat baik, pencadangan CKPN meningkat, laba meningkat dan menjadi pencapaian terbesar sepanjang Perseroan berdiri.</p> <p>Skema KPR dengan perhitungan bunga flat mungkin dapat dilakukan Perseroan, namun skema tersebut akan sangat membebani konsumen terutama apabila diterapkan pada KPR dengan jangka waktu panjang s.d. 30 tahun. Bunga yang dibayarkan konsumen akan lebih tinggi dari pokok kreditnya, dikarenakan bunga dengan skema flat akan lebih tinggi dibandingkan bunga dengan skema anuitas atau efektif yang merupakan skema perhitungan bunga KPR yang umum dipakai oleh pasar. atas hal tersebut, maka untuk saat ini Perseroan tidak akan menggunakan skema tersebut.</p>
4.	<p>Melalui dana CSR, BTN diharapkan dapat berperan aktif dalam membangun mentalitas anak bangsa khususnya Gen Z yang saat ini di tengarai sebagai generasi stroberi (Kompas.id, 26 Juni 2023). Mereka dipandang sebagai generasi muda yang lembek, manja, berdaya juang lemah saat menghadapi tantangan, padahal mereka lahir generasi yang berperan penting untuk meraih Indonesia Emas 2045. Salah satu cara membangun generasi z agar mereka memiliki mental tangguh, punya daya juang yang tinggi dan berjiwa patriotik & rasa nasionalisme yang tinggi, perlu dibagikan secara gratis buku-buku biografi pahlawan nasional. Dengan demikian jiwa nasionalisme, daya juang yang tinggi diharapkan dapat menular kepada gen z yang membaca buku-buku pahlawan tersebut.</p>	<p>Hal tersebut akan menjadi masukan bagi Perseroan.</p>

Hasil Penghitungan Suara

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
10.767.960.536 (96,2067051%)	200 (0,0000018%)	424.565.315 (3,7932931%)

Keputusan

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Mengesahkan:
 - a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan Ernst & Young Global) sesuai Laporan Nomor 00048/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 dengan opini wajar dalam semua hal yang material; dan
 - b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan Ernst & Young Global) sesuai Laporan Nomor 00047/2.1032/AU.2/10/1681-1/1/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 dengan opini wajar dalam semua hal yang material.
3. Dengan telah disetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), seluruhnya untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam laporan-laporan tersebut di atas.

2. Mata Acara Kedua Rapat

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

Pertanyaan, Pendapat, dan/atau Usul

Tidak terdapat pertanyaan, pendapat, dan/atau usul yang diajukan dalam pembahasan mata acara kedua Rapat.

Hasil Penghitungan Suara

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
10.818.441.493 (96,6577290%)	200 (0,0000018%)	374.084.358 (3,3422693%)

Keputusan

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 sebesar Rp3.500.987.620.258,75 (tiga triliun lima ratus miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh ratus enam ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh delapan koma tujuh lima rupiah) sebagai berikut:

1. Sebesar 20% (dua puluh persen) atau sejumlah Rp700.197.524.051,75 (tujuh ratus miliar seratus sembilan puluh tujuh ratus lima ratus dua puluh empat ribu lima puluh satu koma tujuh lima rupiah) atau sebesar Rp49.89136 (empat puluh sembilan koma delapan sembilan satu

tiga enam rupiah) per saham ditetapkan sebagai Dividen Tunai. Pembayarannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dividen bagian Negara Republik Indonesia sebesar Rp420.118.514.441,03 (empat ratus dua puluh miliar seratus delapan belas juta lima ratus empat belas ribu empat ratus empat puluh satu koma nol tiga rupiah) disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.
 - b. Dividen untuk Tahun Buku 2023 dibayarkan secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (*recording date*).
 - c. Direksi diberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan:
 - i. Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan pembayaran Dividen untuk Tahun Buku 2023 sesuai ketentuan yang berlaku.
 - ii. Pemotongan pajak Dividen sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
 - iii. Hal-hal terkait teknis lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sebesar 80% (delapan puluh persen) atau sejumlah Rp2.800.790.096.207,00 (dua triliun delapan ratus miliar tujuh ratus sembilan puluh ratus enam ribu dua ratus tujuh rupiah) digunakan sebagai saldo laba ditahan.

3. Mata Acara Ketiga Rapat

Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2024, serta Tantiem atas Kinerja Tahun 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Pertanyaan, Pendapat, dan/atau Usul

Tidak terdapat pertanyaan, pendapat, dan/atau usul yang diajukan dalam pembahasan mata acara ketiga Rapat.

Hasil Penghitungan Suara

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
10.469.506.271 (93,5401555%)	348.930.722 (3,1175333%)	374.089.058 (3,3423113%)

Keputusan

1. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi Anggota Dewan Komisaris:
 - a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2023 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun Buku 2024.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi Anggota Direksi:
 - a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2023 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. Gaji, Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun Buku 2024.

4. Mata Acara Keempat Rapat

Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024.

Pertanyaan, Pendapat, dan /atau Usul

Tidak terdapat pertanyaan, pendapat, dan/atau usul yang diajukan dalam pembahasan mata acara keempat Rapat.

Hasil Penghitungan Suara

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
10.818.441.493 (96,6577290%)	200 (0,0000018%)	374.084.358 (3,3422693%)

Keputusan

1. Menyetujui penunjukan Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan Ernst & Young Global), sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta laporan lainnya untuk Tahun Buku 2024.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan:
 - a. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2024 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan
 - b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan Ernst & Young Global), karena sebab apa pun, tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2024, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2024, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

5. Mata Acara Kelima Rapat

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II).

Pertanyaan, Pendapat, dan/atau Usul

Mata acara Rapat kelima bersifat laporan sehingga tidak dilakukan sesi tanya jawab.

Hasil Penghitungan Suara

Mata acara Kelima Rapat bersifat laporan sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan.

6. Mata Acara Keenam Rapat

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Pertanyaan, Pendapat, dan /atau Usul

Tidak terdapat pertanyaan, pendapat, dan/atau usul yang diajukan dalam pembahasan mata acara keenam Rapat.

Hasil Penghitungan Suara dan Keputusan Mata Acara keenam Rapat

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
10.128.364.939 (90,4922168%)	690.076.754 (6,1655139%)	374.084.358 (3,3422693%)

Keputusan

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan:
 - a. Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;

- b. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN;
 - c. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN; dan
 - d. peraturan terkait lainnya.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) tersebut di atas
 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris, menyesuaikan perubahan Anggaran Dasar Perseroan jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

7. Mata Acara Ketujuh Rapat

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Pertanyaan, Pendapat, dan/atau Usul

Tidak terdapat pertanyaan, pendapat, dan/atau usul yang diajukan dalam pembahasan mata acara ketujuh Rapat.

Hasil Penghitungan Suara

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
10.430.252.214 (93,1894388%)	388.189.479 (3,4682919%)	374.084.358 (3,3422693%)

Keputusan

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat nama-nama di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan:
 - 1) Sdr. Ahdi Jumhari Luddin – sebagai Komisaris Independen;
 - 2) Sdr. Mohamad Yusuf Permana – sebagai Komisaris;yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPSLB Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 dan Keputusan RUPSLB Tahun 2023 tanggal 11 Januari 2023, masing-masing terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2023 dan 4 Maret 2024, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - 1) Sdr. Elisabeth Novie Riswanti – sebagai Direktur Assets Management;
 - 2) Sdr. Hirwandi Gafar – sebagai Direktur Consumer;
 - 3) Sdr. Jasmin – sebagai Direktur Distribution and Funding;
 - 4) Sdr. Setiyo Wibowo – sebagai Direktur Risk Management;
 - 5) Sdr Chandra M. Hamzah – sebagai Komisaris Utama/Independen;
 - 6) Sdr. Andin Hadiyanto – sebagai Komisaris;
 - 7) Sdr. Armand B. Arief – sebagai Komisaris Independen;yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPSLB Tahun 2019 tanggal 29 Agustus 2019 jo RUPSLB Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 jo RUPS Tahun Buku 2020 tanggal 10 Maret 2021 jo RUPS Tahun Buku 2021 tanggal 2 Maret 2022, Keputusan RUPSLB Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 jo RUPS tahun Buku 2021 tanggal 2 Maret 2022,

Keputusan RUPSLB Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 jo RUPS Tahun Buku 2020 tanggal 10 Maret 2021 jo RUPS Tahun Buku 2021 tanggal 2 Maret 2022, Keputusan RUPSLB Tahun 2019 tanggal 27 November 2019, Keputusan RUPS Tahun Buku 2020 tanggal 10 Maret 2021, dan Keputusan RUPSLB Tahun 2019 tanggal 27 November 2019, terhitung sejak ditutupnya RUPS, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.

3. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

No	Semula	Menjadi
1)	Direktur Distribution and Funding	Direktur Distribution and Institutional Funding
2)	Direktur IT and Digital	Direktur Infomation Technology
3)	Direktur Institutional Banking	Direktur Operations and Customer Experience
4)	-	Direktur SME and Retail Funding

4. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan:

No	Nama	Semula	Menjadi
1)	Sdr. Andi Nirwoto	Direktur IT and Digital	Direktur Information Technology
2)	Sdr. Hakim Putratama	Direktur Institutional Banking	Direktur Operations and Customer Experience

yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPSLB Tahun 2023 tanggal 11 Januari 2023 dan Keputusan RUPS Tahun Buku 2022 tanggal 16 Maret 2023, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan berdasarkan RUPS tersebut.

5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:

- 1) Sdr. Elisabeth Novie Riswanti – sebagai Direktur Assets Management;
- 2) Sdr. Hirwandi Gafar – sebagai Direktur Consumer;
- 3) Sdr. Jasmin – sebagai Direktur Distribution and Institutional Funding;
- 4) Sdr. Setyo Wibowo – sebagai Direktur Risk Management;
- 5) Sdr. Muhammad Iqbal – sebagai Direktur SME and Retail Funding;
- 6) Sdr Chandra M. Hamzah – sebagai Komisaris Utama/Independen;
- 7) Sdr. Bambang Widjanarko – sebagai Komisaris Independen;
- 8) Sdr. Armand B. Arief – sebagai Komisaris Independen;
- 9) Sdr. Adi Sulistyowati – sebagai Komisaris Independen;
- 10) Sdr. Andin Hadiyanto – sebagai Komisaris;

6. Masa jabatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

7. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

a. Direksi

- 1) Direktur Utama

: Nixon L.P. Napitupulu

2)	Wakil Direktur Utama	:	Oni Febriarto Rahardjo
3)	Direktur Finance	:	Nofry Rony Poetra
4)	Direktur Assets Management	:	Elisabeth Novie Riswanti
5)	Direktur Human Capital, Compliance, and Legal	:	Eko Waluyo
6)	Direktur Risk Management	:	Setiyo Wibowo
7)	Direktur Distribution and Institutional Funding	:	Jasmin
8)	Direktur Information Technology	:	Andi Nirwoto
9)	Direktur Consumer	:	Hirwandi Gafar
10)	Direktur Operations and Customer Experience	:	Hakim Putratama
11)	Direktur SME and Retail Funding	:	Muhammad Iqbal

b. Dewan Komisaris

1)	Komisaris Utama/Independen	:	Chandra M. Hamzah
2)	Wakil Komisaris Utama/Independen	:	Iqbal Latano
3)	Komisaris Independen	:	Bambang Widjanarko
4)	Komisaris Independen	:	Armand B. Arief
5)	Komisaris Independen	:	Sentot A. Sentausa
6)	Komisaris Independen	:	Adi Sulistyowati
7)	Komisaris	:	Andin Hadiyanto
8)	Komisaris	:	Herry Trisaputra Zuna
9)	Komisaris	:	Himawan Arief Sugoto

8. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 butir 5), 7), dan 9) baru dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) oleh OJK, maka anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil *Fit and Proper Test* OJK dimaksud.
9. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
10. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) atas anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 butir 5), 7), dan 9).
11. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

Sesuai dengan keputusan mata acara Rapat kedua sebagaimana tersebut di atas, di mana Rapat telah menetapkan Dividen Tunai tahun buku 2023 sebesar Rp700.197.524.051,75,- (tujuh ratus miliar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh empat ribu lima puluh satu koma tujuh lima rupiah) atau sebesar Rp49,89136 (empat puluh sembilan koma delapan sembilan satu tiga enam rupiah) per lembar saham yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2023 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none"> ● Pasar Reguler dan Negosiasi ● Pasar Tunai 	18 Maret 2024 20 Maret 2024
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none"> ● Pasar Reguler dan Negosiasi ● Pasar Tunai 	19 Maret 2024 21 Maret 2024
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (<i>Recording Date</i>)	20 Maret 2024
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2023	5 April 2024

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau *recording date* pada tanggal 20 Maret 2024 dan/atau pemilik Saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 20 Maret 2024.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 5 April 2024 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran Dividen Tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham Perseroan.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, Dividen Tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas Dividen Tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen Tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPh") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

5. Pemegang Saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen dimaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-25/Pj/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 7 Maret 2024

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
DIREKSI

**ANNOUNCEMENT OF
SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND SCHEDULE OF THE DISTRIBUTION OF CASH DIVIDEND
FINANCIAL YEAR 2023
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**

Board of Directors of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“**Company**”), domiciled in Central Jakarta, hereby announces to the Company's shareholders that the Company convened the Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year 2023 (“**Meeting**”) with the following detail information:

A. Day/Date, Time, and Venue of Meeting

Day/Date : Wednesday / March 6th, 2024
Time : 02:31 PM to 05:13 PM
Venue : Menara Bank BTN Jalan Gajah Mada No.1 - Central Jakarta - 10130

B. The Attendance of Members of the Company's Board of Commissioners, Board of Directors and Audit Committee at the Meeting

The Meeting was chaired by Mr. Chandra M. Hamzah, as the President Commissioner/Independent Commissioner, based on the resolution of the Board of Commissioners dated February 21, 2024 that was conveyed through the letter of the Board of Commissioners of the Company \ Number 27/KOM/BTN/II/2024 dated February 21, 2024 regarding Chairman of the Annual General Meeting of Shareholders for Financial Year 2023 of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, and attended by all Members of the Board of Commissioners, all members of the Board of Directors, and all members of the Audit Committee of the Company as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner/Independent Commissioner	:	Mr. Chandra M. Hamzah
Vice President Commissioner/Independent Commissioner	:	Mr. Iqbal Latanro
Independent Commissioner	:	Mr. Armand B. Arief
Independent Commissioner	:	Mr. Sentot A. Sentausa
Commissioner	:	Mr. Andin Hadiyanto
Commissioner	:	Mr. Herry Trisaputra Zuna
Commissioner	:	Mr. Himawan Arief Sugoto

The Board of Directors

President Director	:	Mr. Nixon L.P. Napitupulu
Vice President Director	:	Mr. Oni Febrarto Rahardjo
Director of IT and Digital	:	Mr. Andi Nirwoto
Director of Assets Management	:	Mrs. Elisabeth Novie Riswanti
Director of Distribution and Funding	:	Mr. Jasmin
Director of Risk Management	:	Mr. Setiyo Wibowo
Director of Consumer	:	Mr. Hirwandi Gafar
Director of Finance	:	Mr. Nofry Rony Poetra

Director of Human Capital, Compliance, and Legal

: Mr. Eko Waluyo

Director of Institutional Banking

: Mr. Hakim Putratama

Audit Committee

Chairman/Member

: Mr. Iqbal Latanro

Member

: Mr. Sentot A. Sentausa

Member

: Mr. Andin Hadiyanto

Member

: Mr. Endang A. Suprijatna

Member

: Mr. Peter Eko Budi Darwito

C. Shareholders in Attendance

The Meeting has been attended by the Shareholders and/or their proxy included Serie A Dwiwarna shares representing 11,192,526,051 (eleven billion one hundred ninety two million five hundred twenty six thousand fifty one) shares or constituting 79.7504035% (seventy nine point seven five zero four zero three five percent) of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company up to the date of the Meeting, with a total of 14,034,444,413 (fourteen billion thirty four million four hundred forty four thousand four hundred thirteen) shares consisting of:

- 1 (one) Serie A Dwiwarna shares; and
- 14,034,444,412 (fourteen billion thirty four million four hundred forty four thousand four hundred twelve) serie B shares;

Based on the Company's Shares Registrar dated February 12, 2024 until 04:15 PM.

D. Opportunity to Ask Questions and/or Express Opinions

In the discussion of each agenda item of the Meeting, except the fifth Agenda because it is a report, the shareholders of the Company as well as their proxies have been given an opportunity to ask questions, opinions, and/or proposals.

E. Mechanism of the Resolution-making in the Meeting

The mechanism of the resolution-making in the Meeting was carried out by deliberation to reach a consensus. However, if deliberation to reach a consensus was not reached, the resolution would be taken by voting, which should be approved by the Eligible Shareholders or their legal proxies under the condition:

- a. The first to fourth agenda item of the Meeting, decisions are made if approved by the Eligible Shareholders or their lawful proxies who jointly represent more than 1/2 (one-half) of the total shares with voting rights present at the Meeting.
- b. The fifth agenda item of the Meeting, it is only a report so there is no decision.
- c. The sixth agenda item of the Meeting, decisions are made if approved by the Serie A Dwiwarna Shareholder and other Eligible Shareholders and/or their legal proxies who jointly represent more than 2/3 (two-thirds) of the total shares with rights voices present at the meeting.
- d. The seventh agenda item of the Meeting, decisions are taken if approved by the Serie A Dwiwarna Shareholder and other Eligible Shareholders and/or their legal proxies who jointly represent more than 1/2 (one-half) of the total shares with rights voices present at the meeting.

F. Independent Parties to count and/or validate the vote

The voting results are calculated by PT Datindo Entrycom as the Share Registrar ("BAE") and subsequently validated by Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., both of them are independent parties whom appointed by the Company.

G. Resolutions of the Meeting

Whereas the Meeting has resolved the following resolutions as set forth in the deed of, "Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK TABUNGAN NEGARA Tbk or PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk", Number 06 dated March 6, 2024, which was drawn up before Notary Ashoya Ratam S.H., M.Kn., that substantially as follows:

1. The First Agenda of the Meeting

Approval of Annual Report and Ratification of the Company's Financial Report, Approval for the Board of Commissioners' Supervisory Report and Ratification of the Financial Report of the Micro and Small Business Lending Program of Financial Year 2023, simultaneously with Full Release and Discharge of Liability (*volledig acquit et de charge*) to the Board of Directors for the Management Actions and to the Board of Commissioners for the Supervisory Actions Carried Out during the Financial Year of 2023.

Questions, Opinions and/or Proposals

There were 4 (four) shareholders who submitted questions, opinions and/or proposals regarding the First Agenda of the Meeting. The summary and essence of the question and answer process for the agenda are as follows:

No	Responses/Questions	Answer
1.	<p>To implement the development of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk/"BTN" to improve the Company's performance, we hereby convey the following matters as below:</p> <p>1. For the Company's performance achievements in the Financial Year 2023, we express our gratitude and appreciation to all levels of the Board of Commissioners, Directors, and BTN Employees for:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. The achievement for improving the Company's Performance including: <ul style="list-style-type: none"> 1) Net profit increased 14.97% YoY to IDR 3.50 trillion. 2) Total Credit increased 11.87% YoY to IDR 333.69 trillion. 3) Realized Fee Based Income increased 60.15% YoY to 3.22 trillion. 4) CASA ratio increased from 48.52% to 53.73%. 5) CIR ratio decreased from 46.66% to 45.26%. 6) Gross NPL ratio decreased from 3.38% to 3.01% and LAR decreased from 23.24% to 21.20%. b. The Company's commitment to support the Government programs to maximize the provision of public housing financing, especially for low-income communities, in order to achieve zero backlog by 2045. <p>We hope that these achievements will continue to be improved in the future so that the Company can contribute more optimally not only to shareholder returns but also to the country and society.</p>	<p>Thank you Serie A Dwiwarna Shareholder for the response. The Company will record and follow up on the records of the Serie A Dwiwarna Shareholders.</p>

<p>2. Matters that need attention from the BTN Board of Commissioners and Directors for future performance improvement are as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. To anticipate global economic conditions in 2024 which have the potential for inflationary pressures and a tightening of global monetary policy with increasingly limited fiscal space, the Company must determine a more selective credit distribution strategy, implement sustainable credit risk management, and optimal liquidity management. b. Nationally, economic growth in 2024 is predicted to remain strong and grow positively in the range of 4.8% - 5.2%. Apart from that, the housing sector still has huge room for growth considering the still high number of national housing backlogs, the high number of people who do not yet have adequate housing, and the extension of the stimulus provided by the Government to the housing sector. This opportunity can be utilized well by the Company by optimizing all existing potential so that it can become The Best Mortgage Bank in Southeast Asia as expected. c. The Company should focus on strengthening strategy, business innovation and market expansion to increase market capitalization so that it can provide added value to Shareholders. d. Considering that in 2023 there will be a decrease in net interest income, the Company is expected to: <ul style="list-style-type: none"> 1) Making efforts to reduce the cost of funds through increasing low-cost funds (CASA), strengthening ecosystem-based business, penetrating mobile banking as a digital financial solution, and optimizing penetration of cash management services for customers, so that they can excel in the competition for transaction banking services; 2) Encouraging the housing ecosystem with new KPR models, quality and sustainable expansion of other businesses, as well as optimizing yields on credit distribution while still prioritizing the principle of prudence so that there is a sustainable increase in profitability. e. Continuing to encourage an increase in income contribution originating from Other Operational Income, especially Fee Based Income (FBI) through massive acceleration of digital financial services and transactional banking, especially for internet and mobile banking users, as well as fee-based development from other new sources such as foreign exchange services, forex trading, and structured products; f. Ensuring the achievement of the KPI target for State Capital Participation (PMN), especially on indicators that will not be achieved in 2023, such as BOPO, Gross NPL and Realization of Subsidized KPR; g. In connection with the increasing role of information technology in the banking industry and the increasingly massive hacking attempts and cyber security disturbances which have a very massive impact both operationally, financially and reputationally, the Company is expected to strengthen its cyber security both in terms of policy, infrastructure and operating systems as well as risk mitigation 	
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> h. In order to encourage the principles of sustainable finance, the Company must maintain its commitment to developing ESG initiatives, including through the Company's work programs, lending and issuing debt securities based on green financing principles. In addition, the implementation of ESG initiatives must be aligned with the focus of government programs in the context of national economic recovery and development; i. The Company should be committed to making improvements in the implementation of its Anti-Fraud Strategy in each pillar and provides zero tolerance for any form of fraud, both internal and external; j. Follow up on the findings of internal and external audits/inspectors, optimizing risk management and implementation of the three lines of defense, and always prioritizing the principles of Good Corporate Governance and paying attention to the provisions of Anti-Money Laundering, Prevention of Terrorism Financing and Prevention of Funding for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction (APU PPT and PPPSPM). 	
2.	<ul style="list-style-type: none"> a. in our attention, there is an increase in provisions for impairment losses on financial assets. Is this caused by an increase in NPL due to BTN's inability to pay debts on home loans, motorbike loans, unsecured loans or credit cards? b. Recently, PT Akulaku Finance Indonesia succeeded in getting sanctions lifted by the OJK. Does this have an impact on the banking industry, especially BTN considering that Buy Now Pay Later (BNPL) companies have a CAGR of >10% per year? 	<p>In 2023, the Company will experience a decrease in gross NPL, namely from 3.38% to 3.01%. Regarding the increase in CKPN reserves for NPLs in 2023, reaching 155.16%, the aim is to increase the Company's caution regarding NPL risks and increase the Company's coverage.</p> <p>The company has a different business concentration from PT Akulaku Finance Indonesia. Until now, the Company does not have any competition with PT Akulaku. However, in the future, the Company plans to release a BNPL product which is expected to be licensed by the OJK this year.</p>
3.	<ul style="list-style-type: none"> a. Which business division that caused interference in increasing the Company's profits and what solutions are management taking to improve it? b. As the magnate of subsidized housing mortgages, what is the Company's agenda to create flat installment mortgage services up to 30 years, and will this disrupt the NPL if the 	<p>Basically, all divisions have contributed well, so that no business division has become a distraction in increasing profits. This is reflected in the Company's performance in 2023 which generally recorded good results, including increased assets, increased credit and deposit growth, LAR and other financial ratios recorded well, CKPN reserves increased, profits increased and became the biggest achievement since the Company was established.</p> <p>It is possible for the Company to implement a mortgage scheme with a flat interest calculation, but this</p>

	customer defaults due to retirement or layoff?	scheme will be very burdensome for consumers, especially if applied to mortgages with long terms up to 30 years. The interest paid by consumers will be higher than the principal, because interest with a flat scheme will be higher than interest with an annuity or effective scheme, which is a mortgage interest calculation scheme commonly used by the market. Due to this, the Company will not use this scheme at this time.
4.	Through CSR funds, BTN is expected to play an active role in building the mentality of the nation's children, especially Gen Z, who is currently considered the strawberry generation (Kompas.id, 26 June 2023). They are seen as a young generation who is soft, spoiled, with weak fighting power when facing challenges, even though they are the generation that plays an important role in achieving Golden Indonesia 2045. One way to develop Generation Z is so that they have a tough mentality, have high fighting power and have a patriotic spirit & high sense of nationalism, it is necessary to distribute free biographies of national heroes. In this way, it is hoped that the spirit of nationalism and high fighting spirit can be transmitted to Gen Z who read these hero books	This will be input for the Company.

Voting Results

Affirmative Vote	Non-Affirmative Vote	Abstain
10,767,960,536 (96.2067051%)	200 (0.0000018%)	424,565,315 (3.7932931%)

Resolution

1. Approved the Company's Annual Report including the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the Financial Year of 2023 ending December 31, 2023.
2. Validate:
 - a. The Company's Financial Statements for the Financial Year of 2022 ending December 31, 2022, have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of the Ernst & Young Global) according to Report Number 00048/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/II/2024 dated February 12, 2024 with a fair opinion in all material respects; and
 - b. The Financial Report of the Micro and Small Business Lending Program for the Financial Year of 2023 which ended on December 31, 2023, has been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of the Ernst & Young Global) according to Report Number 00047/2.1032/AU.2/10/1681-1/1/II/2024 dated February 12, 2024, with a fair opinion in all material respects.
3. With the approval of the Company's Annual Report including the Supervisory Task Report of the Board of Commissioners, and the ratification of the Company's Financial Statements and the Financial Statements of the Micro and Small Business Lending Program (PUMK), all for the Financial Year of 2023 ending on December 31, 2023, the GMS grants settlement and full discharge of responsibility (*volledig acquit et de charge*) to all members of the Board of Directors for their actions in managing the Company and to all members of the Board of Commissioners for their supervisory actions of the Company that have been carried out

during the Financial Year of 2023 which ended on December 31, 2023, as long as these actions are not acts crime and are reflected in the report above.

2. The Second Agenda of Meeting

Determination on the Appropriation of the Company's Net Profit for the Financial Year of 2023.

Questions, Opinions, and/or Proposals

There is no questions, opinions and/or proposals submitted in the discussion of the second agenda item of the Meeting.

Voting Results

Affirmative Vote	Non-Affirmative Vote	Abstain
10,818,441,493 (96.6577290%)	200 (0.0000018%)	374,084,358 (3.3422693%)

Resolution

Approved and determined the use of the Company's net profit of the Financial Year of 2023 of IDR 3.500.987.620.258,75 (three trillion five hundred billion nine hundred eighty seven million six hundred twenty thousand two hundred fifty eight point seven five rupiah) as follows:

1. 20% (twenty percent) or IDR 700.197.524.051,75 (seven hundred billion one hundred ninety seven million five hundred twenty four thousand fifty one point seven five rupiah) or IDR 49,89136 (forty nine point eight nine one three six rupiah) per share as Cash Dividend. The payment under the following conditions:
 - a. Dividend share of the Government of the Republic of Indonesia amounting to IDR 420.118.514.441,03 (four hundred twenty billion one hundred eighteen million five hundred fourteen thousand four hundred forty one point zero three rupiah), will be deposited into the Cash Account State Public in Rupiah.
 - b. Dividends of the 2023 Financial Year are paid proportionally to each Shareholder whose name is recorded in the Register of Shareholders on the recording date.
 - c. The Board of Directors are given the authority and power with the right of substitution to do as follows:
 - I. Determination of the distribution schedule and procedures relating to Dividend payments of the 2023 Financial Year in accordance with applicable regulations;
 - II. Dividend tax withholding in accordance with applicable tax regulations;
 - III. Other technical related matters in accordance with applicable regulations.
2. 80% (eighty percent) or IDR 2.800.790.096.207,00 (two trillion eight hundred seven hundred ninety million ninety six thousand two hundred and seven rupiah) as the balance of retained earnings.

3. The Third Agenda of Meeting

Determination of Remuneration (salary/honorarium, facility, and benefit) of 2024, as well as Tantiem for Performance in 2023 for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.

Questions, Opinions, and/or Proposals

There is no questions, opinions and/or proposals submitted in the discussion of the Third agenda item of the Meeting.

Voting Results

Affirmative Vote	Non-Affirmative Vote	Abstain
10,469,506,271 (93.5401555%)	348,930,722 (3.1175333%)	374,089,058 (3.3423113%)

Resolution

1. To grant authority and power of attorney to the Serie A Dwiwarna Shareholders of the Company to determine for members of the Board of Commissioners:
 - a. Tantiem/Performance Incentives/Special Incentives of the 2023 Financial Year in accordance with applicable regulations; and
 - b. Honorarium, Allowances and Facilities for Financial Year 2024.
2. To grant authority and power to the Company's Board of Commissioners by first obtaining written approval from the Serie A Dwiwarna Shareholder of the Company to determine for members of the Board of Directors:
 - a. Tantiem/Performance Incentives/Special Incentives of the 2023 Financial Year in accordance with applicable regulations; and
 - b. Salary, Allowances and Facilities, for Financial Year 2024.

4. The Fourth Agenda of Meeting

Appointment of a Public Accountant and/or the Public Accountant Firm to audit the Company's Financial Report and the Financial Report of the Micro and Small Business Lending Program for the Financial Year of 2024.

Questions, Opinions, and/or Proposals

There is no questions, opinions and/or proposals submitted in the discussion of the fourth agenda item of the Meeting.

Voting Results

Affirmative Vote	Non-Affirmative Vote	Abstain
10,818,441,493 (96.6577290%)	200 (0.0000018%)	374,084,358 (3.3422693%)

Resolutions

1. Approved the appointment of Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of the Ernst & Young Global) as a Public Accounting Firm that will audit the Company's Financial Statements as well as the Financial Statements of the Micro and Small Business Lending Program and other reports for the Financial Year of 2024.
2. Approve the granting of authority and power to the Company's Board of Commissioners to carry out:
 - a. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for other periods in the 2024 Financial Year for the purposes and interests of the Company; and
 - b. Determination of fees for audit services and other requirements for the Public Accountant and/or Public Accounting Firm, as well as appointing a replacement of Public Accountant and/or Public Accounting Firm in the case of the Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm (a member firm of the Ernst & Young Global network), because for whatever reason, unable to complete the provision of audit services for the Company's Financial Report for the Financial Year of 2024 and/or other periods in the Financial Year of 2024, as well as the Financial Report for the Micro and Small Business Funding Program for the Financial Year of 2024, including determining fees for audit services and other requirements for the Accountant The Public and/or the replacement of Public Accounting Firm.

5. The Fifth Agenda of Meeting

Realization Report on the Use of Utilization of Proceeds from Additional Capital with Pre-Emptive Rights Limited Public Offering II (PMHMETD II).

Questions, Opinions, and/or Proposals

The fifth agenda item is a report so there is no question and answer session.

Voting Results

The fifth agenda item for the Meeting is a report so there is no decisions needed.

6. The Sixth Agenda of Meeting

Approval of the Amendments of the Company's Articles of Association.

Questions, Opinions, and/or Proposals

There is no questions, opinions and/or proposals submitted in the discussion of the sixth agenda item of the Meeting.

Voting Results

Affirmative Vote	Non-Affirmative Vote	Abstain
10,128,364,939(90.4922168%)	690,076,754 (6.1655139%)	374,084,358(3.3422693%)

Resolutions

1. Approved the amendments of the Company's Articles of Association, in order to adjust the regulations as below :
 - a. OJK Regulation Number 17 of 2023 dated 14 September 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks;
 - b. Regulation of the Minister of BUMN Regulation Number PER-2/MBU/03/2023 dated 24 March 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of BUMN;
 - c. Regulation of the Minister of BUMN Number PER-3/MBU/03/2023 dated 24 March 2023 concerning Organs and Human Resources of BUMN;
 - d. Other related regulations.
2. Approve to re-arrange all provisions in the Company's Articles of Association in connection with the changes as referred to in point 1 (one) above.
3. Grant authority and power to the Board of Directors with the right of substitution to take all necessary actions related to the Meeting's decisions, including but not limited to drafting and restating the entire Company's Articles of Association in a Notarial Deed, adjusting changes to the Company's Articles of Association if this is required by the relevant agency authorized and submit to the authorized agency to obtain approval and receipt of notification of amendments to the Company's Articles of Association, as well as doing everything that is deemed necessary and useful for these purposes with nothing being excluded.

7. The Seventh Agenda of Meeting

Changes in the Composition of Company's Management.

Questions, Opinions, and/or Proposals

There is no questions, opinions and/or proposals submitted in the discussion of the sixth agenda item of the Meeting.

Voting Results

Affirmative Vote	Non-Affirmative Vote	Abstain
10,430,252,214 (93.1894388%)	388,189,479 (3.4682919%)	374,084,358 (3.3422693%)

Resolutions

1. Confirming the honorable dismissal of the names below as Members of the Company's Board of Commissioners:
 - 1) Mr. Ahdijumhari Luddin – as an Independent Commissioner;
 - 2) Mr. Mohamad Yusuf Permana – as a Commissioner;

who were appointed respectively based on the 2019 EGMS Decision dated 27 November 2019 and the 2023 EGMS Decision dated 11 January 2023, starting from 12 August 2023 and 4 March 2024 respectively, with thanks for the contribution of energy and thoughts given during serves as members of the Company's Board of Commissioners.
2. Dismiss with respect the names below as Company Management:
 - 1) Mrs. Elisabeth Novie Riswanti – as a Director of Assets Management;
 - 2) Mr. Hirwandi Gafar – as a Director of Consumer;
 - 3) Mr. Jasmin – as a Director of Distribution and Funding;
 - 4) Mr. Setiyo Wibowo – as a Director of Risk Management;
 - 5) Mr. Chandra M. Hamzah – as a President Commissioner/Independent Commissioner;
 - 6) Mr. Andin Hadiyanto – as a Commissioner;
 - 7) Mr. Armand B. Arief – as an Independent Commissioner;

who were appointed based on Resolutions of 2019 EGMS dated August 29th, 2019 juncto 2019 EGMS dated November 27th, 2019 juncto 2020 AGMS dated March 10th, 2021 juncto 2021 AGMS dated March 2nd, 2022, Resolutions of 2019 EGMS dated November 27th, 2019 juncto 2021 AGMS dated March 2nd, 2022, Resolutions of 2019 EGMS dated November 27th, 2019 juncto 2020 AGMS dated March 10th, 2021 juncto 2021 AGMS dated March 2nd, 2022, Resolutions of 2019 EGMS dated November 27th, 2019, Resolutions of 2020 AGMS dated March 10th, 2021, and the Resolutions 2019 EGMS dated November 27th, 2019, starting from the closing of the GMS, with thanks for the contribution of energy and thoughts given while serving as Company Management.
3. Change the nomenclature of positions for members of the Company's Board of Directors as follows:

No	Formerly	To Become
1)	Director of Distribution and Funding	Director of Distribution and Institutional Funding
2)	Director of IT and Digital	Director of Information Technology
3)	Director of Institutional Banking	Director of Operations and Customer Experience
4)	-	Director of SME and Retail Funding

4. Transfer the assignment of the names below as Members of the Company's Board of Directors

No	Name	Formerly	To Become
1)	Mr. Andi Nirwoto	Director of IT and Digital	Director of Information Technology
2)	Mr. Hakim Putratama	Director of Institutional Banking	Director of Operations and Customer Experience

Who were appointed appointed based on the 2023 EGMS Decision dated 11 January 2023 and the decision of the 2022 GMS for the 2022 Fiscal Year on 16 March 2023, with the term of office continuing the remaining term of office based on the GMS

5. Appoint the names below as Company Management:
 - 1) Mrs. Elisabeth Novie Riswanti – as a Director of Assets Management;
 - 2) Mr. Hirwandi Gafar – as a Director of Consumer;
 - 3) Mr. Jasmin – as a Director of Distribution and Institutional Funding;
 - 4) Mr. Setiyo Wibowo – as a Director of Risk Management;
 - 5) Mr. Muhammad Iqbal – as a Director of SME and Retail Funding;
 - 6) Mr. Chandra M. Hamzah – as a President Commissioner/Independent Commissioner;
 - 7) Mr. Bambang Widjanarko – as an Independent Commissioner;
 - 8) Mr. Armand B. Arief – as an Independent Commissioner;
 - 9) Mrs. Adi Sulistyowati – as an Independent Commissioner;
 - 10) Mr. Andin Hadiyanto – as a Commissioner.
6. The tenure of the appointed members of the Board of Directors and Board of Commissioners as referred to in number 5, is in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, considering the laws and regulations in the Capital Market sector and without reducing the GMS's right to dismiss at any time.
7. With the confirmation of dismissal, transfer of duties, and appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners as referred to in number 1, number 2, number 3, number 4, and number 5, the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners the Company is as follows:
 - a. **Board of Directors**
 - 1) President Director : Nixon L.P. Napitupulu
 - 2) Vice President Director : Oni Febriarto Rahardjo
 - 3) Director of Finance : Nofry Rony Poetra
 - 4) Director of Assets Management : Elisabeth Novie Riswanti
 - 5) Director of Human Capital, Compliance and Legal : Eko Waluyo
 - 6) Director of Risk Management : Setiyo Wibowo
 - 7) Director of Distribution and Institutional Funding : Jasmin
 - 8) Director of Information Technology : Andi Nirwoto
 - 9) Director of Consumer : Hirwandi Gafar
 - 10) Director of Operations and Customer Experience : Hakim Putratama
 - 11) Director of SME and Retail Funding : Muhammad Iqbal
 - b. **Board of Commissioners**
 - 1) President Commissioner/Independent Commissioner : Chandra M. Hamzah
 - 2) Vice President Commissioner/Independent Commissioner : Iqbal Latanro
 - 3) Independent Commissioner : Bambang Widjanarko
 - 4) Independent Commissioner : Armand B. Arief
 - 5) Independent Commissioner : Sentot A. Sentausa
 - 6) Independent Commissioner : Adi Sulistyowati
 - 7) Commissioner : Andin Hadiyanto
 - 8) Commissioner : Herry Trisaputra Zuna
 - 9) Commissioner : Himawan Arief Sugoto

8. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners who are appointed as referred to in number 5 points 5), 7), and 9) can only carry out their duties after obtaining approval from the Financial Services Authority (OJK) for the Fit and Proper Test and fulfilling applicable laws and regulations. If a member of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company is later declared not approved as a member of the Board of Directors and Board of Commissioners in the Fit and Proper Test by OJK, then the member of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company will be honorably dismissed from the date of the stipulation of the Fit and Proper Test.
9. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners appointed as referred to in number 5 who are still serving in other positions which are prohibited by statutory regulations from holding concurrent positions as members of the Board of Directors or Board of Commissioners of State-Owned Enterprises, then the person concerned must resign or be dismissed from his position.
10. Request the Board of Directors to submit a written request to the Financial Services Authority for the implementation of a Fit and Proper Test on the appointed members of the Board of Directors and Board of Commissioners as referred to in number 5 points 5), 7), and 9)
11. Grant power of attorney with the right of substitution to the Company's Directors to state the decisions of this GMS in the form of a Notarial Deed and appear before a Notary or authorized official, and make necessary adjustments or improvements if required by the authorized party for the purposes of implementing the contents of the meeting's decisions.

SCHEDULE AND PROCEDURE FOR THE PAYMENT OF CASH DIVIDENDS

In accordance with the resolution of the Second Agenda of the Meeting as mentioned above, where the Meeting has determined a cash dividend for the financial year of 2023 amounting to IDR 700.197.524.051,75 - (seven hundred billion one hundred ninety seven million five hundred twenty four thousand fifty one point seven five rupiah) or IDR 49,89136 (fourty nine point eight nine one three six rupiah) per share to be distributed to the Shareholders of the Company, it is hereby notified the schedule and procedure for the payment of cash dividends for the financial year of 2023 as follows:

Schedule of Distribution of Cash Dividend

NO	DESCRIPTION	DATED
1	End of Trading Period of Shares with Dividend Rights (<i>Cum Dividend</i>) <ul style="list-style-type: none"> ● Regular and Negotiation Market ● Cash Market 	March 18 th , 2024 March 20 th , 2024
2	Beginning of Trading Period of Shares Without Dividend Rights (<i>Ex Dividend</i>) <ul style="list-style-type: none"> ● Regular and Negotiation Market ● Cash Market 	March 19 th , 2024 March 21 st , 2024
3	List of Shareholders entitled to Dividend (Recording Date)	March 20 th , 2024
4	Cash Dividend Payment Date for Financial Year of 2023	April 5 th , 2024

Procedure for Payment of Cash Dividend

1. Cash Dividend will be distributed to Shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholders Register or recording date on March 20, 2024 and/or owners of Company's Shares in Sub Securities Accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the trading closing date, 20 March 2024.

2. For Shareholders whose shares are placed in KSEI's collective custody, the payment of cash dividend will be made through KSEI and will be distributed on April 5th, 2024 into the Customer Fund Account (*Rekening Dana Nasabah - RDN*) at the Securities Company and/or Custodian Bank where the Shareholders open a securities account. As for the Shareholders of the Company whose shares are not included in the collective custody of KSEI, the payment of cash dividend will be transferred to the account of the Shareholders of the Company.
3. The cash dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations.
4. Based on the prevailing tax laws and regulations, the cash dividend will be excluded from the tax object if it is received by the shareholders of the resident corporate taxpayer ("Resident Corporate Taxpayer") and the Company does not deduct Income Tax on the cash dividends paid to the Resident Corporate Taxpayer. Cash dividends received by shareholders of resident individual taxpayers ("Resident Individual Taxpayer") will be excluded from the tax object as long as the dividends are invested in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. For Resident Individual Taxpayer that does not meet the investment provisions as mentioned above, the dividends received by the person concerned will be subject to income tax ("PPh") in accordance with the applicable laws and regulations, and the PPh must be paid by the Resident Individual Taxpayer concerned in accordance with the provisions of Government Regulation Number 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support the Ease of Doing Business.
5. Shareholders of the Company can obtain confirmation of dividend payments through a securities company and or custodian bank where Shareholders of the Company open a securities account, then the shareholders of the Company must be responsible for reporting the dividend receipts referred to in tax reporting for the relevant tax year in accordance with the laws and regulations applicable taxation.
6. Shareholders who are Non-Resident Taxpayers whose tax withholding will use the rate based on the Double Taxation Avoidance Agreement are required to comply with the requirements of the Director General of Taxes Regulation Number PER-25/Pj/2018 concerning Procedures for Application of the Double Taxation Avoidance Agreement and submit proof documents record or receipt of DGT/Certificate of Domicile (SKD) that has been uploaded to the website of the Directorate General of taxes to KSEI or BAE in accordance with KSEI rules and regulations. Without the such document, the cash dividend paid will be subject to Article 26 Income Tax of 20%.

Jakarta, March 7, 2024
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
BOARD OF DIRECTORS